

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR
119/PDT.G/2015/PN.YYK TENTANG WANPRESTASI
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

STUDI KASUS

**Oleh :
Henry Gunawan**

**NPM :
41151010130125**

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

**Di bawah Bimbingan :
Hana Krisnamurti, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**COURT DECISION OF YOGYAKARTA NUMBER
119/PDT.G/2015/PN.YYK ABOUT DEFAULT CONNECTED
WITH ARTICLE 1243 CODE OF CIVIL LAW**

CASE STUDY

**By :
Henry Gunawan**

**NPM :
41151010130125**

Program Specificity : Civil Law

**Under The Guidance of :
Hana Krisnamurti, S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Henry Gunawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130125
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus
Judul Penulisan Tugas Akhir : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR
119/PDT.G/2015/PN.YYK TENTANG
WANPRESTASI DIHUBUNGKAN
DENGAN PASAL 1243 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Henry Gunawan
NPM. 41151010130125

ABSTRAK

Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah satu pihak yang berjanji, yang tidak menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak debitur dengan kreditur. Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi merupakan suatu hubungan hukum, yang mempunyai arti bahwa hak dari si berpiutang (pihak yang berhak menuntut) itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Jadi, apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, maka si berpiutang dapat menuntutnya di muka Hakim. Namun dalam kasus ini terdapat suatu putusan pengadilan yang menolak gugatan wanprestasi dengan alasan pihak tergugat telah memenuhi kewajiban melunasi hutangnya (prestasi). Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YYK tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit ? dan bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YYK ?

Metode yang Penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis peraturan yang berlaku dalam hukum perdata dan Undang-undang Koperasi. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan mengutamakan uraian-uraian kalimat tanpa menggunakan rumus dan atau angka statistik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyaluran kredit dari Koperasi Urip Mulyo kepada Kuntjoro dan Lanny Sutanti berdasarkan perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010, dalam perjanjian kredit tersebut diatur mengenai denda keterlambatan pembayaran. Namun aturan tersebut tidak diindahkan oleh Majelis Hakim, hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/PDT.G/2015/PN.YYK menurut penulis bersifat subjektif. Hakim hanya melihat kepentingan dari pihak tergugat sedangkan hakim tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak penggugat karena jelas terlihat dalam kasus ini yang dirugikan adalah pihak penggugat. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang memperhatikan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dengan jelas menyebutkan bahwa Kreditur wajib membayar penggantian biaya kerugian dan bunga akibat wanprestasi walaupun kreditur telah membayar dengan lunas karena pembayaran dilakukan setelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

ABSTRACT

Default is a form of denial from one of the promised parties, which does not perform its obligations in the form of achievement of what is the accord in the agreement between the debtor and the creditor. An agreement is a relationship between two or more persons, located within the property, with one party entitled to achievement and the other to fulfill that achievement. The relationship between two persons or two parties is a legal relationship, which means that the right of the debtor (the entitled party) is guaranteed by law or law. so, if the claim is not met, then the debtor may demand it before the Judge. However, there is a court decision that rejects the claim of default because the defendant has fulfilled the obligation to pay off the debt (achievement). Based on the interesting thing to be studied is how is the analysis of Judgment of Yogyakarta District Court Number 119/PDT.G/2015/PN.YYK about default in credit agreement? And what is the legal consideration of the Judge in the Decision of the Yogyakarta District Court Number 119/PDT.G/2015/PN.YKK?

The discussion of this case study the author uses normative juridical research method that aims to find the principles and foundations of positive legal philosophy, and find the law in-concreto. The specification of this study is descriptive analytical, that is not only describe the problem, but also analyze through the rules that apply in civil law and land law. Data collection techniques were conducted through literature study to obtain secondary data and field research to collect primary data.

The result concluded that the credit distribution from Urip Mulyo Cooperative to Kuntjoro and Lanny Sutanti based on credit agreement No. 0094/PK/V/2010, in the payment agreement. However, the rules can not be moved by the Panel of Judges, the result of the research concludes the decision of the judge in the decision of the Yogyakarta District Court No. 119/PDT.G/2015/PN.YYK by the author is subjective. The Judge only sees information from parties that are not required by parties that are clearly visible in this case who are harmed by the plaintiff. Decision making of the Panel of Judge, the author argues that the panel of judges is less concerned with Article 1243 of The Civil Code which clearly states that the Creditor shall be the expenses incurred an the costs associated with the applicable taxes have been determined.

KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM WR. WB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat studi kasus yang berjudul : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 119/PDT.G/2015/PN.YYK TENTANG WANPRESTASI DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Penyusunan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahnya sehingga dapat terwujud tugas akhir ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. HJ. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 9. Ibu HJ. Sri Pursetyowati, S.H., M.H. selaku Wali dosen Penulis pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 10. Bapak dan Ibu dosen serta Asisten dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
 11. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
- Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda N. Nandang Taryana dan Ibunda Siti Sa'adah serta tidak lupa kedua adik penulis Andrian Hermanto dan Indri Meilani yang telah mencurahkan doa, dorongan, kasih sayang serta semangatnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada rekan seperjuangan yang berada di lingkungan Universitas Langlangbuana yang telah berbaik hati untuk dapat saling berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Serta sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menguatkan, mengingatkan, selalu ada disaat suka maupun duka, memberi dukungan serta doa yang tulus sehingga menjadi motivasi dan dukungan moral kepada penulis.

Semoga bantuan, dorongan, kebaikan, ketulusan hati, dan pertolongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Bandung, Mei 2018

Henry Gunawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	6

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YKK Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YKK?

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian
3. Pengertian Perjanjian Kredit.....
4. Pengertian Wanprestasi
5. Akibat Hukum Dari Wanprestasi.....

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan	44
----------------------------	----

B. Pertimbangan hukum.....	45
----------------------------	----

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YKK Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.....	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/PDT.G/2015/PN.YKK.....	56

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan	61
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP